

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris*. Kencana, Makassar.
- Ahmad Sudiro. 2013. *Hukum dan Keadilan, Aspek Nasional dan Internasional*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Aloysius Wisnusubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika. Malang.
- Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana. Jakarta.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Raja Grafindo Perss. Jakarta.
- Dewa Gede Atmadja, 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*. Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Handoyo, B. Restu Cipto, 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1999. *"Black's Law Dictionary"*. Seventh Edition:St.Paulmin West Pubicing,Co.
- HR. Ridwan.2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- I.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. CitraAditya Bakti. Bandung

- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan. Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Juliansyah Noor. 2017. *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Cet. VII, Kencana. Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa. Bandung.
- Kartika Risna. 2011. *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*. Serambi. Jakarta.
- Laksmi, Fuad dan Budiantoro, 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*, Penerbit Pernaka. Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*, Deep Publish, Yogyakarta.
- Lawrence M Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Muchsan, 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Saiman. 2017. *Politik Perbatasan*. Inteligencia Media. Malang.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet. I. Rineka cipta. Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ctk. Pertama. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sinyo Harry Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- , 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Syamsuddin haris. 2007. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. LIPPI pres. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta,
- Utrecht, E. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Balai Buku Ichtar. Jakarta.
- Victor M.situmorang dan Cormetyna S, 1976. *Ilmu pemerintahan*. Fak Sospol UGM. Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Selemba Empat. Jakarta.
- Zainal Asikin dkk, 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia. Group.

## **Jurnal**

- Rinaldi Sarlim dan Fitrah Sri Rahayu. 2019. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. Vol 1 No. 1. Celebes Equilibrium Jurnal.

Tengku Fadhlaini. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Uray Muhammad Nur, 2013. *Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak)*, Tesis, Ilmu Akutansi Universitas Gadjah Mada.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang penilaian barang milik daerah lingkup pemerintah provinsi sulawesi selatan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

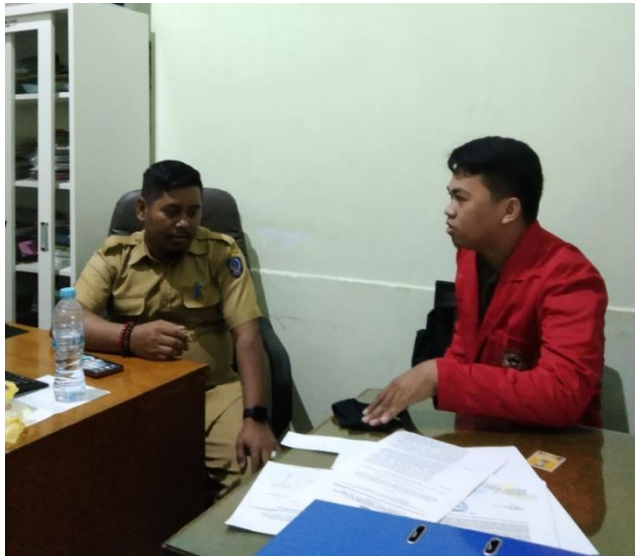
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## Lampiran

- 1) Wawancara dengan Arsyad selaku Sekretaris Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan



- 2) Wawancara dengan Aswan selaku Kepala Seksi Wilayah 3 BKAD Provinsi Sulawesi Selatan



- 3) wawancara dengan Marsuki selaku Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan



- 4) wawancara dengan Indra Agriawan selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan



5) wawancara dengan Indrawan selaku PPNS Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

